



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Upaya Peningkatan Pasukan Perdamaian Perempuan
Sebagai Diplomasi Preventif Indonesia (2014-Mei 2019)**

Skripsi

Oleh

Tasya Enzela Wirautami br. Ginting

2015330192

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Upaya Peningkatan Pasukan Perdamaian Perempuan
Sebagai Diplomasi Preventif Indonesia (2014-Mei 2019)**

Skripsi

Oleh

Tasya Enzela Wirautami br. Ginting

2015330192

Pembimbing

Dr. Atom Ginting Munthe

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Tasya Enzela Wirautami br. Ginting
Nomor Pokok : 2015330192
Judul : Upaya Peningkatan Pasukan Perdamaian Perempuan
Sebagai Diplomasi Preventif Indonesia (2014-Mei 2019)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 16 Juli 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Sapta Dwikardana, Ph.D.

Sapta Dwikardana

Sekretaris

Dr. Atom Ginting Munthe

Atom Ginting Munthe

Anggota

Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol.

Jessica Martha

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tasya Enzela Wirautami br. Ginting

NPM : 2015330192

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya Peningkatan Pasukan Perdamaian Perempuan Sebagai *Preventive Diplomacy* Indonesia (2014-2018)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 25 Juni 2019

Tasya Enzela Wirautami br. Ginting

ABSTRAK

Nama : Tasya Enzela Wirautami br. Ginting
NPM : 2015330192
Judul : Upaya Peningkatan Pasukan Perdamaian
Perempuan Sebagai Diplomasi Preventif Indonesia (2014-Mei 2019)

Pasukan perdamaian merupakan instrumen yang digunakan oleh Misi Pemeliharaan Perdamaian Persatuan Bangsa-Bangsa (MPP PBB) untuk menjaga stabilitas wilayah konflik. Peran dari pasukan perdamaian semakin diandalkan dimulai dari kesuksesannya dalam meredam tensi di Terusan Suez pada tahun 1957 pada era Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjöld. Tetapi sangat disayangkan dalam praktiknya, terdapat kesenjangan dari partisipasi pasukan perdamaian perempuan dan laki-laki. Padahal, melalui banyak riset, ditemukan bahwa partisipasi perempuan memiliki banyak sekali kelebihan. Indonesia menyadari rendahnya partisipasi perempuan dan Indonesia sebagai salah satu negara dengan angka pengiriman pasukan perdamaian terbanyak mencoba meningkatkan angka partisipasi perempuan guna menciptakan proses perdamaian yang lebih kondusif dan inklusif.

Untuk menjawab permasalahan ini, penulis mengacu kepada dua konsep. Yang pertama adalah diplomasi preventif yang merupakan konsep diplomasi yang bersifat mencegah semakin parahnya suatu konflik. Konsep kedua adalah pengarusutamaan gender mengupayakan untuk melibatkan perempuan untuk berpartisipasi, membawa persepsi, pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan sehingga menciptakan suatu kebijakan dan pengambilan keputusan dalam proses politik. Diakhir penelitian, penulis menemukan bahwa memang Indonesia sedang berupaya meningkatkan pasukan perdamaian perempuan yang didorong dengan kelebihan-kelebihan yang ditemukan setelah melibatkan pasukan perdamaian perempuan di suatu misi perdamaian, yang menjadi salah satu agenda diplomasi preventifnya. Juga, dalam penelitian ini, penulis juga mengemukakan beberapa tantangannya.

Kata kunci: Pasukan perdamaian perempuan, diplomasi preventif, pengarusutamaan gender, MPP PBB.

ABSTRACT

Nama : *Tasya Enzela Wirautami br. Ginting*
NPM : *2015330192*
Judul : *The Efforts to Increase Women Peacekeepers as
Indonesia Preventive Diplomacy (2014-May 2019)*

Peacekeepers are instruments used by the United Nations Peacekeeping Mission (MPP PBB) to maintain the stability of the conflict region. The role of peacekeeping forces increasingly relied on starting from its success in reducing tension on the Suez Canal in 1957 in the era of UN Secretary General Dag Hammarskjöld. But unfortunately, in the practice, there is a gap between the participation of female and male peacekeepers. Even though, founded in a lot of researches, it is true that women's participation has many advantages. Indonesia is aware of the low participation of women and Indonesia as one of the countries with the highest number of peacekeeping forces trying to increase the number of women's participation to create a more conducive and inclusive peace process.

To answer this problem, the author refers to two concepts. The first is preventive diplomacy which is a concept of diplomacy that aim to prevent the severity of a conflict. The second concept is that gender mainstreaming which seeks to involve women to participate, bringing perceptions, experiences, knowledge, and interests to create a policy and decision making in the political process. At the end of the study, the author found it is true that Indonesia is trying to improve women's peacekeeping forces which were encouraged by the advantages found after involving women's peacekeeping forces on a peace mission, as one of their preventive diplomacy. Also, in this study, the authors also presented several challenges.

Keywords: *Women peacekeepers, preventive diplomacy, gender mainstreaming, UN PKO.*

KATA PENGANTAR

Isu perempuan dan keterlibatannya dalam aspek apapun sering dipandang sebelah mata. Padahal dengan meningkatkan peran perempuan dalam berbagai aspek, dunia bukan hanya sedang mendorong produktivitasnya tetapi juga sedang memperkaya perspektif dari kaum perempuan yang keterlibatannya masih minim. Kali ini, penulis mencoba untuk berpendapat dan memberikan sedikit perspektif tentang peran perempuan yang terfokus pada peran pasukan perdamaian perempuan Indonesia. Hal keterlibatan pasukan perdamaian perempuan ini membuat penulis terkagum-kagum akan keberanian mereka para srikandi Indonesia, mereka yang tergabung di Kontingen Garuda dan Satgas Garuda Bhayangkara, mereka berani mendobrak segala stereotip perempuan yang tumbuh berkembang di negara yang sangat kental budaya patriarkinya. *Mereka bukan sekedar wanita, mereka adalah perempuan.*

Penulis berharap dengan skripsi ini, apapun latar belakang pembaca, baik laki-laki ataupun perempuan, tersadar bahwa perempuan juga mampu melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Perempuan, lebih dari apa yang dunia definisikan tentang mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih untuk Mama dan Babe yang sudah tidak hentinya percaya kepada saya untuk melakukan segala hal yang saya yakini, dan tetap setia mendampingi ketika diri kehilangan arah.

Untuk Bang Atom, yang selalu dengan sabar membimbing saya, memberikan pendapat, menjadi teman diskusi, yang mengajarkan saya ketulusan, kejujuran, dan kebaikan. Tanpa bimbingan beliau, mungkin tulisan ini tidak akan pernah ada.

Untuk teman-teman yang selalu dengan sabarnya mendengar setiap keluh dan kesan, disaat pasang surut kehidupan, disaat susah maupun suka. Mungkin ada beberapa yang datang dan pergi, menghancurkan dan menumbuhkan, menemani dan meninggalkan. Terimakasih sudah memberikan spektrum warna yang sangat indah dan menjadi pembelajaran dalam hidup.

Untuk Bandung dan segala kenangannya, terimakasih sudah menjadi saksi bisu atas tangis, tawa, dan amarah. Bandung bagiku adalah tempat untuk menjadi dewasa dan berkontemplasi untuk hidup.

Sejauh ini, waktu dimana penulisan skripsi ini merupakan periode waktu yang paling turbulen dalam hidup saya, dan pada akhirnya saya berterimakasih kepada diri saya sendiri telah tetap berjuang, dan akan selalu terus berjuang.

Seperti apa yang tertulis dalam 2 Timotius 4:7, *I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith.*

I dedicate this thesis to Mama and Babe.

Thank you Mama and Babe for the love, life, and lessons.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Pembatasan Masalah	7
1.2.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kajian Literatur	9
1.5 Kerangka Pemikiran	11
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	19
1.6.1 Metode Penelitian	19
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	19
1.7 Sistematika Pembahasan	20
BAB II – REALISASI DAN PENGEMBANGAN DIPLOMASI PREVENTIF MELALUI KETERLIBATAN PASUKAN PERDAMAIAN	21
2.1 Diplomasi Preventif dan Perkembangannya	21
2.2 Pasukan Perdamaian Sebagai Agen Pelaksana Diplomasi Preventif	27
2.3 Diplomasi Preventif Indonesia	28
2.3.1 Diplomasi Preventif Indonesia di ASEAN	28
2.3.2 Diplomasi Preventif Indonesia Melalui Pasukan Perdamaian MPP PBB	31

BAB III – PARTISIPASI PASUKAN PERDAMAIAN PEREMPUAN INDONESIA DI MPP PBB.....	39
3.1 Urgensi Pengadaan Pasukan Perdamaian Perempuan di MPP PBB....	39
3.1.1 Peran Pasukan Perdamaian Perempuan di MPP PBB.....	39
3.1.2 Tantangan dalam Pengadaan Pasukan Perdamaian Perempuan di MPP PBB.....	44
3.2 Visi dan Misi Indonesia Terkait Pasukan Perdamaian Perempuan.....	47
BAB IV – MENINGKATNYA PASUKAN PERDAMAIAN PEREMPUAN SEBAGAI INSTRUMEN DIPLOMASI PREVENTIF.....	53
4.1 Upaya Peningkatan Pengiriman Pasukan Perdamaian Perempuan Indonesia dalam Realisasi Diplomasi Preventif.....	53
4.2 Tantangan Indonesia dalam Menjalani Diplomasi Preventif Melalui Pasukan Perdamaian Perempuan.....	56
BAB V - KESIMPULAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peran Perempuan dalam Proses Perdamaian (1990-2017)	3
Tabel 3.1 Peran Perempuan di Beberapa Misi MPP PBB.....	40
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Pasukan Perdamaian Perempuan dan Laki-laki di MPP PBB.....	45

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	:	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ARF	:	<i>ASEAN Regional Forum</i>
GAM	:	Gerakan Aceh Merdeka
DK PBB	:	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
KTT	:	Konferensi Tingkat Tinggi
MINURSO	:	<i>United Nations Mission for the Referendum in the Western Sahara</i>
MINUSCA	:	<i>United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic</i>
MONUSCO	:	<i>United Nations Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo</i>
MPP PBB	:	Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa- Bangsa MPP PBB
NGO	:	<i>Non-governmental Organizations</i>
OAS	:	<i>Organization of American States</i>
OSCE	:	<i>Organization for Security and Cooperation in Europe</i>
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
SDG	:	<i>Sustainable Development Goals</i>
UNAMID	:	<i>United Nations-African Union Hybrid Mission in Darfur</i>
UNIFIL	:	<i>United Nations Interim Force in Lebanon</i>

UNISFA	:	<i>United Nations Interim Security Force for Abyei</i>
UNMISS	:	<i>United Nations Mission in the Republic of South Sudan</i>
UUD '45	:	Undang-Undang Dasar 1945
USG	:	<i>Undersecretary-general</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

United Nations Peacekeeping atau Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (MPP PBB) merupakan sebuah alat dari PBB yang mampu untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional¹. Dimana pada awal pembentukannya, yaitu pada masa perang dingin, ruang kerja MPP PBB sendiri hanya sebatas pemeliharaan gencatan senjata dan menjaga stabilitas lapangan agar dapat memudahkan alur usaha politik dalam upaya penyelesaian konflik. Tetapi dalam perkembangannya, MPP PBB kini bergeser dari peran yang bersifat tradisional, yang mengedepankan tugas-tugas militer, menjadi alat yang multidimensional dimana kini pada praktiknya tidak hanya melibatkan pasukan militer saja, tetapi juga melibatkan pasukan kepolisian dan sipil. Juga, MPP PBB kini tidak hanya menangani kasus konflik antar negara saja tetapi juga meluas ke ranah konflik internal, ancaman kelompok radikal dan terorisme, dan penyakit menular².

Tetapi sangat disayangkan dalam praktiknya, terdapat kesenjangan jumlah partisipan antara perempuan dan laki-laki. Dari data yang dikeluarkan oleh MPP PBB, dari total keanggotaan MPP PBB pada Agustus 2018 baik dari pasukan kepolisian dan militer yang berjumlah 86.858 pasukan, jumlah pasukan MPP PBB

¹ United Nations Peacekeeping, “*What is Peacekeeping*,” <https://peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping> diakses 28 September 2018

² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “*Indonesia dan United Nations Peacekeeping Operations*,” <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Partisipasi-Indonesia-dalam-Pasukan-Misi-Perdamaian-PBB.aspx> diakses 28 September 2018

perempuan hanya berjumlah 4.391, dimana jika dipersentasekan jumlah keanggotaan perempuan tidak mencapai lima persen³.

Sebagai salah satu poin di *Sustainable Development Goals* (SDG), tidak dapat dipungkiri, hari-hari ini isu kesetaraan gender merupakan salah satu isu yang menjadi sorotan masyarakat internasional terutama dalam hal partisipasinya. Isu ini dianggap penting karena dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang pertahanan dan keamanan, dalam praktiknya bermanfaat untuk menghasilkan sebuah keputusan yang inklusif, lebih rasional, dan efektif karena tidak hanya melibatkan perspektif laki-laki saja tetapi juga dari perspektif perempuan⁴.

Hal keseriusan dalam meningkatkan partisipasi perempuan juga ditunjukkan oleh Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dengan mengeluarkan Resolusi 1325 tahun 2000 yang berbicara tentang keinginan DK PBB untuk memasukkan perspektif gender ke dalam misi perdamaian guna terlibat dalam perlindungan perempuan yang dimana pada wilayah konflik sering terjadi kekerasan berbasis gender⁵. Resolusi tersebut menekankan pentingnya partisipasi yang sama dan keterlibatan penuh perempuan dalam semua upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan. Dalam perumusannya juga, Resolusi 1325 juga menekankan perluasan peran dan kontribusi perempuan dalam berbagai upaya perdamaian yang dilakukan oleh PBB, termasuk dalam peran militer, polisi, dan sipil, serta dalam pengambilan keputusan.

³ United Nations Peacekeeping Data, "Gender," <https://peacekeeping.un.org/en/gender> diakses 28 September 2018

⁴ UN Women, "*Women and Sustainable Development Goals*," <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2322UN%20Women%20Analysis%20on%20Women%20and%20SDGs.pdf> diakses 28 September 2018

⁵ Dewan Keamanan PBB, S/RES/1325 (2000).

Juga, minimnya angka partisipasi perempuan dalam proses perdamaian juga dirampung oleh *Council on Foreign Relations* pada tahun 1990-2017. Dari data yang dikeluarkan *Council on Foreign Relations* pada tahun 2017 (Tabel 1.1) baik dari mediator, saksi dan penandatanganan, dan negosiator, jika dirata-ratakan, partisipasi perempuan dalam proses perdamaian hanya sebesar lima persen, dimana perbandingan ini sangat tidak sepadan dengan rata-rata peran laki-laki yang sebanyak 95%⁶.

Tabel 1.1 Peran Perempuan dalam Proses Perdamaian (1990-2017)

Peran	Perempuan	Laki-Laki
Mediator	2%	98%
Saksi dan Penandatanganan	5%	95%
Negosiator	8%	92%

Sumber: *Council on Foreign Relations*⁷

Selain data yang tercatat dalam tabel diatas, menurut data yang dikeluarkan oleh *Council on Foreign Relations* melalui penelitian yang sama dikatakan bahwa dari 1.187 perjanjian perdamaian yang dikeluarkan dari tahun 1990 hingga 2017 hanya 19% perjanjian damai yang melibatkan partisipasi perempuan, sementara hanya 5% perjanjian damai yang membahas kekerasan berbasis gender yang terkait

⁶ *Council on Foreign Relations*, "Women's Participation in Peace Processes," 2018, <https://www.cfr.org/interactive/womens-participation-in-peace-processes> diakses 28 September 2018.

⁷ *Ibid*

dengan konflik⁸. Minimnya angka partisipasi perempuan dalam proses perdamaian ini dianggap belum mampu menciptakan keputusan yang inklusif karena pengambil keputusan masih didominasi oleh kaum laki-laki. Menjadi menarik untuk dibahas, karena bahkan 17 tahun sejak dikeluarkannya Resolusi 1325, masih terdapat kesenjangan angka yang begitu tinggi dalam partisipasi perempuan dan laki-laki.

Hal keseriusan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian juga menjadi salah satu perhatian Indonesia dalam berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup; untuk mengurangi kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan; dan terakhir untuk memperkuat kelembagaan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dan *gender mainstreaming* (pengarustamaan gender), Indonesia menetapkan masalah pemberdayaan perempuan sebagai salah satu prioritas nasional yang dirangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025. Melalui agenda Indonesia melalui RPJMN 2005-2025 tersebut, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kebijakan yang dapat mendorong partisipasi yang setara baik untuk laki-laki maupun perempuan dengan meningkatkan aksesibilitas peran keduanya dalam pembangunan nasional⁹.

Dalam hal itu juga, Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam sepuluh negara dengan pengiriman pasukan perdamaian terbanyak di dunia, dapat memainkan perannya dalam meningkatkan pengiriman pasukan perdamaian perempuan yang selaras dengan objektif dari RPJMN 2005-2025. Dimana pada

⁸ *Council on Foreign Relations*, "Women's Participation in Peace Processes," 2018, <https://www.cfr.org/interactive/womens-participation-in-peace-processes> diakses 28 September 2018.

⁹ Kementerian PPN/Bappenas, "Pembangunan Kesetaraan Gender: Background Study RPJMN III (2015-2019)"

tahun 2017, hal ini sudah menjadi agenda Indonesia untuk meningkatkan sebanyak 15 persen perempuan dari total pasukan perdamaian sebanyak 2.867 pasukan¹⁰.

Maka dari itu, hal keseriusan Indonesia yang selaras dengan poin MPP PBB dan DK PBB menjadi salah satu alasan mengapa hal partisipasi perempuan Indonesia dalam MPP PBB menjadi penting untuk diteliti. Dimana dalam pembahasannya, penelitian ini akan berjudul “Upaya Peningkatan Pasukan Perdamaian Perempuan Sebagai diplomasi preventif Indonesia yang akan dikaji dari tahun 2014- Mei 2019”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam praktik penyamarataan partisipasi perempuan dengan laki-laki dalam MPP PBB bukanlah menjadi suatu hal yang mudah untuk dijalankan. MPP PBB sendiri mempunyai target untuk setiap negara yang mengirimkan pasukan perdamaian untuk dapat meningkatkan persentase pasukan perempuan hingga mencapai 15%. Dari seluruh negara anggota yang berkontribusi, menurut data yang dikeluarkan oleh MP PBB pada Maret 2018, dari total 3.234 pasukan aktif belum ada satu negara pun yang berhasil berkontribusi untuk mengirimkan pasukan perempuan sebanyak 15% dari total pasukan yang negara kirimkan¹¹. Hal ini memberatkan Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam sepuluh negara

¹⁰ Aubrey Kandelila Fanani, “Indonesia tambah perempuan pasukan perdamaian dunia,” <http://www.antaraneews.com/berita/621990/indonesia-tambah-perempuan-pasukan-perdamaian-dunia> diakses 28 September 2018.

¹¹ UN Peacekeeping Data, “*Operational Effect and Women Peacekeepers: Addressing the Gender Imbalance*,” https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/180412_march_2018_oma_women_without_continents_1.pdf diakses 28 September 2018.

pengirim pasukan perdamaian terbesar, Indonesia akan kesulitan untuk mencapai target untuk mengirimkan pasukan perempuan sebanyak 15% dari total pasukan.

Indonesia, menunjukkan keseriusannya didalam perananan pasukan perdamaian perempuan dengan memasukkan isu ini kesalah satu isu utama Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020. Dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, kepada media saat Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020 dikatakan bahwa:

“Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan fokus kepada, pertama memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Indonesia akan mendorong budaya *habit of dialogue*, dalam penyelesaian konflik. **Indonesia juga meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB termasuk peran perempuan.**¹²”

Dengan jumlah pasukan sebanyak 2.694 personil polisi dan tentara, per September 2018, Indonesia menduduki posisi kedelapan dengan jumlah terbesar pengiriman pasukan perdamaian. Tetapi dari total jumlah pasukan tersebut, angka partisipasi pasukan perdamaian perempuan hanyalah 81 orang saja, yang berarti hanya berpresentase tiga persen dari total personil¹³. Dimana untuk memenuhi target 15 persen dari total pasukan perdamaian, Indonesia membutuhkan sebanyak 404 pasukan perdamaian perempuan dan angka tersebut sangat besar dan sulit untuk dipenuhi.

¹² Natalia Santi, “Empat Fokus Indonesia sebagai Anggota DK PBB,” CNN Indonesia, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180609075412-134-304777/empat-fokus-indonesia-sebagai-anggota-dk-pbb> diakses 25 Juni 2019

¹³ Agnes Anya, “Low Numbers Hamper Indonesia’s Pledge to Send More Women Peacekeepers,” Jakarta Post, 2018 <http://www.thejakartapost.com/news/2018/06/25/low-numbers-hamper-indonesias-pledge-to-send-more-women-peacekeepers.html> diakses 28 September 2018.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan membahas secara spesifik membahas tentang upaya peningkatan angka pasukan perdamaian perempuan sebagai realisasi diplomasi preventif Indonesia. Dalam pembahasannya akan dianalisis melalui perkembangan data pengiriman pasukan perdamaian perempuan Indonesia yang dihubungkan dengan target yang ingin dicapai yang dimana nantinya dalam pembahasan akan dikaitkan dengan konsep diplomasi preventif, dan mengapa peningkatan pasukan perdamaian perempuan menjadi salah satu agenda yang penting.

Juga, dalam pembahasannya akan dikaitkan apakah dengan meningkatkan angka pasukan perdamaian perempuan dapat dengan efektif dalam upaya menghidupkan nilai-nilai dalam diplomasi preventif. Dengan demikian, poin-poin yang dibahas akan seputar pasukan perdamaian perempuan Indonesia, upaya peningkatannya, dan kaitannya dengan realisasi poin diplomasi preventif guna meredam tensi di daerah konflik dan memaksimalkan potensi pasukan perdamaian Indonesia yang sesuai dengan tujuan perlibatannya.

Adapun dalam pembatasan waktu, penelitian ini akan meneliti perkembangan angka pasukan perdamaian perempuan dan perannya dalam diplomasi preventif pada tahun 2014-Mei 2019. Tahun 2014 merupakan awal periode dari Presiden Joko Widodo dan juga dimana pada tahun 2019 Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo terpilih sebagai salah satu anggota DK PBB dan berkomitmen untuk meningkatkan angka pengiriman pasukan perdamaian perempuan sebanyak 15% dari total pasukan perdamaian¹⁴. Mei 2019, diambil sebagai akhir karena hingga

¹⁴ Agnes Anya, "Low Numbers Hamper Indonesia's Pledge to Send More Women Peacekeepers," Jakarta Post (2018) <http://www.thejakartapost.com/news/2018/06/25/low-numbers-hamper-indonesias-pledge-to-send-more-women-peacekeepers.html> diakses 28 September 2018.

dari awal hingga akhir Mei 2019, Indonesia mendapat kesempatan untuk menduduki kursi presidensi DK PBB. Dimana hal ini juga mendukung RPJMN Indonesia 2005-2025 yang didalamnya terdapat komitmen Indonesia untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Indonesia. Dimana pemilihan periode waktu, kedepannya dapat memudahkan untuk menganalisa perkembangan dan tantangan dalam membahas partisipasi perempuan Indonesia di MPP PBB, sebagai pembanding sebelum dan sesudah Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB di periode tahun 2019.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada bagian-bagian sebelumnya, maka muncul sebuah pertanyaan yang akan menjadi acuan dalam pembahasan penelitian, yaitu “Bagaimana upaya peningkatan pasukan perdamaian perempuan Indonesia mampu menjadi instrumen Indonesia dalam menjalankan diplomasi preventif Indonesia?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari hubungan bagaimana pasukan perdamaian perempuan Indonesia mampu menjadi salah satu upaya untuk menjalankan preventif diplomasi Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini berguna untuk mengetahui hubungan dari peningkatan pasukan perdamaian perempuan Indonesia, perannya dalam meredam tensi di

daerah konflik, dan bagaimana hal tersebut menjadi upaya perjalanan preventif diplomasi Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi tentang peran dan dinamika perempuan dalam konflik.

1.4 Kajian Literatur

Dalam perkembangannya, peran perempuan telah melalui beberapa tahapan mengenai perspektif dan partisipasi perempuan perempuan baik secara dampak ataupun perannya dalam konflik. Hal ini diawali dari *Declaration on the Elimination of Violence against Women* (1993), dilanjutkan *Beijing Declaration and Platform for Action* (1995), hingga puncaknya saat keluarnya Resolusi 1325 dari DK PBB, peran perempuan dipercayai memungkinkan untuk menciptakan komunitas dan perdamaian yang berkelanjutan. Hal ini merupakan hasil inovatif dunia internasional pasca perang dingin mengenai operasi perdamaian yang memasukkan perspektif gender ke dalam proses politik. Istilah gender tidaklah mengacu kepada perbedaan biologis, tetapi pada sifat maupun tingkah laku terhadap pria, perempuan, dan pemahaman setiap individu terhadapnya. Gender mengacu pada perbedaan dalam peran yang dimainkan perempuan dan laki-laki di masyarakat dan dalam status sosial mereka. Yang dimana tidak dapat dipungkiri bahwa cara individu memandang peran perempuan dan pria juga berbeda dan bergantung pada tradisi, latar belakang sosial dan budaya yang melekat pada setiap individu¹⁵.

¹⁵ Szilvia Sommer, "Female Leadership in Conflict Prevention, Diplomacy and UN Peacekeeping Initiatives," University of Malta, 2014.
https://www.diplomacy.edu/system/files/dissertations/11031016115012_Sommer_%28Library%29.pdf diakses 10 Oktober 2018.

Dalam memelihara perdamaian dunia, PBB mendorong untuk perempuan lebih aktif berperan untuk meningkatkan efektivitas operasional unit, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan manusia dalam suatu wilayah masyarakat yang tengah dalam konflik ataupun pascakonflik. Namun dalam penelitian yang ditulis oleh Kristen Cordell yang berjudul *Security or Tokenism: Evaluating Role of Women as Peacekeepers within the United Nations Department of Peacekeeping*, dampak penambahan pasukan perdamaian perempuan bukan menekankan pada sisi keamanan tetapi pada bagaimana uniknya peran pasukan perdamaian perempuan dalam memberi dampak ke komunitas sekitar¹⁶. Lebih jauh lagi, mendorong perempuan untuk mengambil bagian dalam reformasi sektor keamanan akan membantu dalam mencapai masyarakat yang setara dan perdamaian jangka panjang. Selain itu dengan pembawaan seorang perempuan dengan melibatkan perempuan dalam proses perdamaian akan meningkatkan interaksi dengan lokal. Dimana hal ini, keterbukaan dengan masyarakat lokal akan memungkinkan untuk mengumpulkan data dan digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam untuk kebutuhan pembangunan komunitas¹⁷.

Nadine Puechguirbal dalam tulisannya mengatakan bahwa, walaupun upaya untuk meningkatkan angka pasukan perdamaian semakin gencar dilaksanakan dan dibuktikan dalam praktiknya memberikan dampak positif, hanya beberapa negara yang telah berhasil secara signifikan meningkatkan jumlah perempuan dalam pasukan polisi dan militer nasional mereka. Beberapa argumen yang berbicara tentang hal kurangnya partisipasi negara dalam pasukan perdamaian perempuan ini

¹⁶ Kristen Cordell, "*Security or Tokenism: Evaluating Role of Women as Peacekeepers within the United Nations Department of Peacekeeping*," Peace Research Institute Oslo, 2011.

¹⁷ Ibid

salah satunya disebabkan oleh dimana mereka harus melaksanakan peran keibuan mereka dan memperkecil mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam tindakan pencegahan dan resolusi konflik¹⁸.

1.5 Kerangka Pemikiran

Ketika berbicara tentang awal pembentukan PBB (atau pada awal yang bernama Liga Bangsa-Bangsa) harus diketahui bahwa lembaga ini sejak dari awal mempunyai cita-cita untuk membangun budaya preventif, untuk mencegah perang di berbagai belahan dunia, untuk menciptakan perdamaian yang bersifat kolektif¹⁹. Dimana, diplomasi preventif adalah sebuah upaya non-koersif dan berproses pada tindakan persuasif. Adapun konsep diplomasi preventif ini secara resmi diperkenalkan oleh Dag Hammarskjöld, Sekretaris Jenderal PBB yang kedua, tetapi pada dasarnya budaya preventif dalam PBB ini sudah menjadi jantung PBB sedari awal badan ini terbentuk. Gerald Cossette dalam presentasi tulisannya dalam ASEAN Regional Forum Seminar mengatakan “*Even before Hammarskjöld, common language being used in the League of Nations documents as well as in the UN Charter referred extensively to prevention and preventive actions in the conduct of diplomacy.*”²⁰

Dilatarbelakangi oleh meningkatnya tensi perang dingin saat Hammarskjöld menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB, untuk menahan potensi dari negara-

¹⁸ Nadine Puechguirbal, “*The Cost of Ignoring Gender in Conflict and Post-Conflict Situations: A Feminist Perspective*,” VU University Amsterdam, 2012

¹⁹ Dino Patti Djalal, “*Indonesia and Preventive Diplomacy: A Study of the Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea*,” London: The London School of Economics and Political Science (2000)

²⁰ Gerald Cossette, “*Preventive Diplomacy: A Restricted Definition*,” Makalah dipresentasikan dalam Asean Regional Dorum Senior Seminar, Seoul, 1995.

negara lainnya untuk ikut terseret dalam konflik perang dingin Barat dan Timur, Hammarskjöld menegaskan upaya preventif harus mengisi ke berbagai celah yang dianggap sebagai potensi melebarnya pertikaian perang dingin. Hammarskjöld mengatakan bahwa aksi preventive harus:

“in the first place aim at filling the vacuum so that it will not provoke actions from any of the major parties, the initiative for which might be taken for preventive purposes but might in the truth lead to counteraction from the other side.”²¹

Diplomasi preventif adalah sebuah konsep yang dikeluarkan oleh PBB dengan melibatkan komunitas internasional untuk terlibat dalam menjaga stabilitas perdamaian dunia, bukan hanya untuk memberhentikan konflik, tetapi juga untuk menciptakan perdamaian dan keamanan yang keberlanjutan baik dalam proses politik atau revitalisasi ekonomi pasca konflik, sebuah konsep diplomasi yang berfokus pada pencegahan bukan ‘pengobatan’²². Diperkenalkan lebih lanjut pada Konferensi Tingkat Tinggi Dunia 2005 (KTT Dunia 2005), sebagai upaya kolektif negara anggota PBB untuk membangun budaya tindakan preventif, Ban Ki-moon merilis laporan mengenai diplomasi preventif dalam pembahasan tentang konflik, Ia juga menekankan bahwa lebih baik mencegah, daripada ‘mengobati’. Jika dibahas dan memperluas konsep dari diplomasi preventif itu sendiri memungkinkan negara untuk berkontribusi dalam berbagai bantuan kemanusiaan yang keterlibatannya tersebut tidak dianggap memperkecil kemungkinan-kemungkinan politis atau intervensi yang menggunakan persenjataan²³.

²¹ Dag Hammarskjöld, *“The Servant of Peace: A Selection of Speeches and Statements of Dag Hammarskjöld, Secretary-General of the United Nations,”* Bodley Head, 1960.

²² Sukawarsini Djelantik, *“Diplomasi: antara Teori dan Praktik,”* Graha Ilmu, 2008.

²³ Simon S.C. Tay dan Aaron Cho, *“Peacekeeping, Peacebuilding, and Preventive Diplomacy,”* http://www.jcie.org/japan/j/pdf/pub/publst/1451/13_tay-choo.pdf diakses 8 Oktober 2018.

Pada awalnya, hal pencegahan konflik ini juga diterapkan oleh Liga Bangsa-bangsa dengan konsep “pengamatan perdamaian”. Adapun prinsip dari diplomasi preventif itu sendiri adalah sebagai medium sebuah negara untuk memberikan bantuan secara moril ataupun materil. Dimana, dalam praktiknya diplomasi preventif mempunyai tiga objektif, yaitu guna mencegah konflik antar negara atau pemerintah dengan kelompok minoritas di dalam negara, guna mencegah perselisihan menjadi konflik terbuka, dan yang terakhir, jikalau sebuah konflik menjadi konflik terbuka, diplomasi preventif berguna untuk meminimalkan penyebaran konflik tersebut²⁴.

Secara jelas, konsep pelaksanaan budaya preventif dan upaya pencegahannya dijelaskan dalam Piagam PBB Artikel 1 yang berisikan:

*“..to maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the **prevention** and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.”²⁵”*

Konsep ini mengacu pada tindakan yang diambil pada tahap sedini mungkin untuk mencegah timbulnya perselisihan antarpihak yang dapat menyebabkan eskalasi konflik dan untuk membatasi pergerakannya jikalau konflik tersebut tereskelasi. Maka dari itu juga, konsep diplomasi preventif ini disebut juga sebagai

²⁴ United Nations, “Preventive Diplomacy: Delivering Results,” 2011, <https://www.un.org/undpa/sites/www.un.org.undpa/files/SG%20Report%20on%20Preventive%20Diplomacy.pdf> diakses 25 Juni 2019

²⁵ United Nations, “Charter of the United Nations, Chapter 1: Purposes and Principles.”

*quiet diplomacy*²⁶, yaitu upaya diplomasi ini melibatkan banyak pihak dibalik layar yang tidak terlalu tersorot dunia internasional untuk berpartisipasi.

Upaya dalam diplomasi preventif ini meliputi yang pertama, mediasi, yang biasanya dilakukan oleh para diplomat atau utusan khusus yang berguna untuk memberikan dorongan dari masyarakat internasional dalam penyelesaian jika pihak bersangkutan tidak ingin untuk melakukan negosiasi. Kedua, misi politis, yang dipimpin oleh warga sipil yang berguna untuk memfasilitasi dialog untuk mencegah eskalasi ancaman dimana upaya ini bersifat inklusif dalam upaya rekonsiliasi. Ketiga, yaitu misi pemeliharaan perdamaian yang dilaksanakan oleh MP PBB, yang menggabungkan diplomasi yang dijalankan melalui mandat yang dikeluarkan oleh DK PBB, dimana hal ini digunakan sebagai upaya memberikan penawaran akan hal rekonsiliasi dan pemantauan dari perkembangan pembangunan politik sehingga mendorong penyelesaian konflik yang berjalan secara damai²⁷.

Dalam prinsipnya, diplomasi preventif memiliki delapan prinsip utama yaitu: (1) menggunakan metode perdamaian seperti negosiasi, penyelidikan, mediasi, dan konsiliasi; (2) tidak memaksa; (3) tepat waktu; (4) membutuhkan kepercayaan terhadap bantuan pihak ketiga; (5) keputusan bersifat konsensus dan melibatkan konsultasi; (6) bersifat sukarela; (7) berlaku untuk konflik antar negara; dan (8) dilakukan sesuai dengan hukum internasional²⁸.

²⁶ Eileen F. Babbitt, "*Preventive Diplomacy by Intergovernmental Organizations: Learning from Practice*," Tufts University, 2012, https://fletcher.tufts.edu/sites/default/files/pubs_babbitt-eileen-IN-oct-2012.pdf diakses 8 Oktober 2018

²⁷ Report of the Secretary General "*Preventive Diplomacy: Delivering Results*," <https://www.un.org/undpa/sites/www.un.org.undpa/files/SG%20Report%20on%20Preventive%20Diplomacy.pdf> diakses 8 Oktober 2018.

²⁸ Jim Della-Giacoma, "*Preventive Diplomacy in Southeast Asia: Redefining the ASEAN Way*," International Peace Institute, 2011.

Dewasa ini, diplomasi preventif juga dilaksanakan oleh peranan aktor dan juga alat yang lebih luas dari sebelumnya. Hal ini sebagian disebabkan oleh munculnya kerangka normatif yang lebih kuat yang mendukung upaya internasional untuk mencegah konflik kekerasan dan untuk memastikan masuknya dukungan kepada pemerintahan, perdamaian dan keamanan. Dimana dalam hal menghidupi pengembangan sistem peringatan dini, mekanisme pendanaan cepat, pembentukan struktur pencegahan khusus, dan penggunaan berkelanjutan dari utusan khusus. Hal ini juga ditunjukkan dalam laporan PBB pada KTT Dunia 2005 bahwa Unit Dukungan Mediasi yang dibentuk di PBB pada tahun 2006 telah menjadi layanan baik untuk upaya mediasi PBB dan juga semakin perkembangan dalam organisasi regional yang meningkatkan kapasitas mediasi organisasi regional²⁹.

Selain itu juga, misi politik juga semakin banyak diluncurkan, pada tahun 2010, PBB, Uni Eropa, *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE), dan *Organization of American States* (OAS), meluncurkan lebih dari 50 misi politik ke lapangan sebagai upaya diplomasi preventif. Terdapat beberapa instrument, aktor utama, dan alat dalam menjalankan diplomasi preventif, diantaranya adalah Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, *Peacebuilding Commission*, Sekretaris Jenderal, Utusan Khusus, kantor regional PBB, misi politik, investigator, dan pasukan perdamaian yang dikirimkan melalui mandat PBB³⁰.

²⁹ Report of the Secretary General “*Preventive Diplomacy: Delivering Results*,” <https://www.un.org/undpa/sites/www.un.org.undpa/files/SG%20Report%20on%20Preventive%20Diplomacy.pdf> diakses 8 Oktober 2018.

³⁰ Ibid

Terdapat beberapa indikator yang menjadi tolak ukur dari diplomasi preventif yang dibagi dalam dua respon yang pertama *Peace-time responses* dan *crisis-time responses*. Adapun indikator ini ditulis oleh Amitav Acharya yang digabung oleh beberapa cendekiawan yaitu Boutros-Ghali, Gregg A. Beyer, Leon Gordenker, dan James Macintosh.

Dalam *peace-time responses* terdapat empat tahap dalam penanganannya yaitu proses *confidence building* yang sebagai media pertukaran informasi dan transparansi; *institution-building* yang merupakan sebagai dasar pengujian pengaturan dan kerjasama yang lebih formal antar birokrasi; *early-warning* yang melibatkan pemantauan perkembangan di bidang politik, militer, dan ekologi dan lainnya, dan pemerintah; *preventive humanitarian actor* dimana pada bagian ini adalah area di mana *Non-governmental Organizations* (NGO), lembaga pembangunan bilateral dan multilateral dan organisasi regional dapat memainkan peran penting sebagai agen diplomasi preventif.

Indikator yang kedua dalam diplomasi preventif adalah *crisis-time responses*, yang didalamnya terdapat *fact-finding* yang berkaitan erat dengan fase *early-warning* dimana dilakukan pengumpulan dan analisis informasi mengenai situasi konflik secara komprehensif, mencakup ranah domestik hingga global, dan tidak luput dari memerhatikan aspek sosial, ekonomi, strategis, dan politik yang mendasari; *good offices and goodwill missions* dimana dilakukan pengiriman utusan sebagai upaya menunjukkan keseriusan dalam mengentas konflik; *crisis-management* yang bertujuan untuk mengukur langkah rekonsiliasi, mediasi, dan

arbitrasi yang berguna untuk meredam ketegangan; dan *preventive deployment* merupakan sebuah penempatan yang berguna untuk mencegah eskalasi konflik³¹.

Walaupun begitu, diplomasi preventif juga mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Hal ini juga disebabkan oleh sifat diplomasi preventif yang berbasis *good will* dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam menyelesaikan masalah juga tidak semua pihak memandang urgensi preventif dalam tingkatan yang sama atau menyingkirkan pihak ketiga untuk membantu proses perdamaian. Dalam hal ini Boutros Boutros-Ghali pernah mengatakan bahwa

“..the Secretary-General’s ability to take effective preventive action depends most critically on the political will of the parties to the potential conflict. In international politics, as in human medicine, the physician cannot impose treatment that the patient is prepared to accept. Important improvements have been made in the Secretary-General’s capacity to diagnose and prescribe. Failure to take prevention actions is, in any case, only rarely due to lack of early warning; the symptoms are usually there for all to see. What is too often lacking at present is a predisposition by the parties to accept third party assistance to their dispute. Ways have to found to persuade them, without infringing on their sovereignty or other rights, that it is in their own interests to accept the help of the United Nations and other international players rather than to allow their dispute to turn into armed conflict”³²”

Selain menekankan pada diplomasi, penelitian ini juga akan menggunakan konsep pengarusutamaan gender dimana diplomasi preventif yang menekankan pada budaya tindakan preventif juga memerlukan peran perempuan yang aktif dalam mengambil keputusan. Dari definisi yang disepakati oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1997, pengarusutamaan gender adalah:

³¹ Amitav Acharya, *“Preventive Diplomacy: Issues and Institutions in the Asia Pacific Region,”* York University, 1994, <http://www.amitavacharya.com/sites/default/files/Preventive%20Diplomacy.pdf> diakses 8 Oktober 2018.

³² Boutros-Ghali, *“An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking, and Peace-keeping,”* <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/004711789201100302> diakses 20 Juni 2019

“...the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women’s as well as men’s concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality.”³³

Dimana definisi tersebut menyimpulkan bahwa pengarusutamaan gender melibatkan perempuan untuk berpartisipasi, membawa persepsi, pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan sehingga menciptakan suatu kebijakan dan pengambilan keputusan dalam proses politik.

Pengarusutamaan gender dianggap dapat membawa perubahan dalam organisasi baik secara struktur, prosedur dan budaya, untuk menciptakan lingkungan organisasi yang lebih kondusif untuk mempromosikan kesetaraan gender dengan melibatkan perempuan lebih dalam proses politik terutama dalam pengambilan keputusan. Pengarusutamaan gender ini juga didorong dengan dikeluarkannya Resolusi 1325 pada tahun 2000. Dimana resolusi ini dianggap sebagai suatu gerakan yang revolusioner yang membahas partisipasi perempuan dalam proses perdamaian³⁴. Pengarusutamaan gender adalah upaya PBB untuk memasukkan perspektif gender dalam berbagai kebijakan dan program sehingga keputusan akan proses politik maupun perdamaian tersebut tidak dibangun melalui kacamata laki-laki saja tetapi juga melalui kacamata perempuan.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

³³ United Nations, “*Gender Mainstreaming: An Overview*,” 2002, <http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/e65237.pdf> diakses 8 Oktober 2018.

³⁴ Laura J. Shepherd. “*Gender Matters in Global Politics*,” Routledge , 2010.

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis melalui kumpulan-kumpulan literatur yang menjadi acuan penelitian. Adapun tujuan dipilihnya metode penelitian kualitatif ini berguna untuk menghubungkan dan menganalisis proses, makna, dan interaksi aktor yang menggunakan teori sebagai landasan dalam pembahasan penelitian³⁵. Maka dari itu, penelitian ini akan bersifat deskriptif-analitis melalui interpretasi hubungan antara subyek yang adalah peningkatan pasukan perdamaian perempuan Indonesia dan obyeknya adalah praktik diplomasi preventif.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan berbagai sumber data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah melalui wawancara dengan anggota badan terkait. Sedangkan sumber sekunder bersumber dari jurnal atau riset yang sudah dilakukan sebelumnya ataupun surat kabar yang beredar baik secara *offline* ataupun *online*, dan situs-situs terpercaya berisikan informasi yang diperlukan. Selain itu juga, data sekunder dapat diperoleh dari hasil-hasil konferensi mengenai hal terkait, serta data yang dikeluarkan lembaga yang berpartisipasi dalam isu tersebut.

³⁵ John W. Creswell, “*Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating and Qualitative Research, 4th Edition*”, University of Nebraska-Lincoln (2012), hal 230.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab. Bab pertama dibuka dengan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta metode penelitian.

Bab kedua membahas tentang realisasi dan pengembangan diplomasi preventif melalui keterlibatan pasukan perdamaian. Diawali dengan membahas perspektif diplomasi preventif menurut Dag Hammarskjöld, tahun-tahun awal, dan pengembangan diplomasi preventif dijalankan saat digaungkan oleh Hammarskjöld. Bab ini juga membahas tentang bagaimana pasukan perdamaian menjadi aktor dalam diplomasi preventif secara global dan melalui perspektif Indonesia. Juga, bab kedua akan membahas pandangan Indonesia secara umum mengenai diplomasi preventif.

Dilanjutkan dengan bab tiga yang membahas tentang partisipasi pasukan perdamaian perempuan Indonesia di MPP PBB. Dalam pembahasannya, bab ini akan menjelaskan peran perempuan dalam proses perdamaian yang dilanjutkan dengan pembahasan peran dan tantangan pasukan perdamaian perempuan.

Setelah itu, dilanjutkan dengan bab empat. Dalam bab ini, penulis mencoba mengabungkan bab dua dan tiga menggunakan bab satu sebagai pondasi. Bab ini akan membahas tentang bagaimana upaya peningkatan pasukan perdamaian perempuan Indonesia mampu menjalankan diplomasi preventif Indonesia, dan diakhiri dengan bab lima yang merupakan kesimpulan penelitian.